

IMPLEMENTASI PROGRAM JALAN MANTAP DAN ALUS LAMONGAN (JAMULA) TERHADAP PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMONGAN DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH

(Studi Kasus Program Jamula di Kecamatan Solokuro)

Jiddan Gamal Qondas¹, Abd Hadi², Moh. Sa'diyin³

¹ Universitas Sunan Drajat Lamongan,

² Universitas Sunan Drajat Lamongan,

³ Universitas Sunan Drajat Lamongan

*gubernur.jiddan10@gmail.com*¹, *abd.hadi@insud.ac.id*², *mohsya'diyin@insud.ac.id*³)

Abstract:

This study discusses the Implementation of the Lamongan Mantap and Alus Road Program (Jamula) towards the development of Lamongan Regency viewed from the perspective of Siyash Dusturiyah in Solokuro District, as a form of monitoring the progress of the Lamongan Regency government's performance towards its super priority program. The purpose of this study is to analyze the implementation of the Lamongan Mantap and Alus Road Program (Jamula) in infrastructure development in Lamongan Regency, especially in Solokuro District, using the Siyash Dusturiyah perspective as a normative and ethical basis. The Jamula Program as a regional government effort to improve road quality is expected to accelerate mobility and support economic and social development. This type of research includes qualitative research with a case study method to examine how the implementation of the program is in accordance with the principles of siyash dusturiyyah which emphasizes justice, welfare, and government responsibility in managing public affairs. The data collected uses interview, observation, and documentation techniques. The data sources for this study are of two types, namely primary data sources and secondary data. Primary data sources come from the Regent of Lamongan Regency, Head of the Public Works (PU) Bina Marga Department, Members of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Lamongan Regency Electoral District (Dapil) V, the Head of Solokuro District and the community in Solokuro District, Lamongan Regency. Secondary data were obtained from books, websites, the Qur'an, Hadith and journals related to the problem being studied. The results of this study indicate that the Jamula program has had a positive impact on the development of Lamongan Regency, but there are several challenges in its implementation that need to be improved to be more effective and sustainable. This study provides recommendations so that the implementation of infrastructure development programs can always be based on the principles of siyash industrialism to achieve equitable community welfare.

Keywords: *Jamula Program, Infrastructure Development, Siyash Dusturiyah*

Abstrak:

Penelitian ini membahas Implementasi Program Jalan Mantap dan Alus Lamongan (Jamula) terhadap pembangunan Kabupaten Lamongan ditinjau dari Siyash Dusturiyah di Kecamatan Solokuro, sebagai bentuk pengawasan progress kinerja pemerintah kabupaten Lamongan terhadap program super prioritasnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Program Jalan Mantap dan Alus Lamongan (Jamula) dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lamongan, khususnya di Kecamatan Solokuro, dengan menggunakan perspektif Siyash Dusturiyah sebagai landasan normatif dan etis. Program Jamula sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas jalan diharapkan dapat mempercepat mobilitas dan mendukung pembangunan ekonomi serta sosial. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan program tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip siyash dusturiyyah yang menekankan pada keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintah dalam mengatur urusan publik. Data yang dihimpun menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini ada dua jenis yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer berasal dari Bupati Kabupaten Lamongan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga, Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan Daerah pilih (Dapil) V, Camat Solokuro dan masyarakat di Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, website, Al-qur'an, Hadist dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini bahwa program Jamula telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan Kabupaten Lamongan, namun terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya yang perlu diperbaiki agar lebih efektif dan berkelanjutan. Kajian ini memberikan rekomendasi agar pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dapat selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip siyasah dusturiyah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Kata Kunci: Program Jamula, Pembangunan Infrastruktur, Siyasah Dusturiyah

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur jalan raya merupakan salah satu kebijakan penting yang diambil oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena sektor transportasi yang baik dan efisien dapat memperlancar distribusi barang dan jasa, meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta menarik investasi yang pada akhirnya mendukung aktivitas ekonomi yang lebih berkembang. Kebijakan pembangunan jalan raya sebagai bentuk investasi utama untuk mendukung pembangunan ekonomi ini sangat relevan di daerah-daerah yang terus berupaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur mereka guna mencapai kemajuan yang lebih pesat.¹

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi terluas di pulau jawa yaitu seluas 47 803,49 (km²), dengan luas wilayah yang cukup banyak, tak terhindarkan dari permasalahan jalan rusak, dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur panjang jalan kewenangan provinsi menurut kondisi jalan (km), 2021 tercatat dalam kondisi jalan baik di Jawa Timur yaitu 820,44, kondisi jalan sedang di Jawa Timur yaitu 425,92 kondisi jalan rusak di Jawa Timur yaitu 101,37 kondisi jalan rusak berat di Jawa Timur yaitu 46,28. Permasalahan jalan rusak yang ada tentunya dapat menghambat perjalanan ataupun arus ekonomi dalam suatu daerah. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Timur dengan luas wilayah 1782,05 (km²), Kabupaten Lamongan yang menjadi jalur penghubung antar kota dimana terdapat jalan alternatif untuk menghubungkan antara kota dan untuk menuju ke arah ibu kota ketika melewati diluar jalan tol, dalam hal ini jalan rusak juga terjadi di Kabupaten Lamongan.²

Berdasarkan data yang dikutip dari BPS tahun 2021 dapat diketahui terdapat 37% kerusakan jalan di Kabupaten Lamongan, ini menjadi salah satu daerah dengan tingkat kerusakan cukup panjang. Misalkan saja jika dibandingkan dengan Kota Surabaya yang hanya memiliki kerusakan jalan sepanjang 0,005% atau Kota Mojokerto sepanjang 24% dari total

¹ Saudi Sau'ud Aslur, Dkk "Implementasi Program jalan mantap dan alus lamongan (jamula)", (2023), 78

² *Ibid.*, 79.

keseluruhan jalan. Kemudian Kabupaten Tuban sebanyak 13% dari total panjang jalan keseluruhan. Permasalahan kerusakan jalan yang belum diperbaiki di Kabupaten Lamongan ini dapat memicu permasalahan peningkatan volume kerusakan jalan setiap tahunnya yang mengakibatkan terjadinya permasalahan lain di Kabupaten Lamongan. Misalnya saja peningkatan kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa, terjadinya jalan yang berlubang disetiap ruas, terjadinya banjir dan terhambatnya akses masyarakat yang membuat banyaknya keluhan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Lamongan.³

Sehingga fenomena peningkatan kerusakan jalan di Kabupaten Lamongan mendorong pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mengeluarkan dan mengesahkan Program prioritas dalam penanganan perbaikan infrastruktur khususnya jalan, pemerintah Kabupaten Lamongan mengeluarkan suatu program baru yang diberikan nama Jalan Mantap dan Alus Lamongan (Jamula), yang dijalankan oleh Dinas PU Bina Marga. Program Jalan Mantap Dan Alus Lamongan (Jamula) yang direncanakan sejak tahun 2021 dan dijalankan pada tahun 2022 bertujuan untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur khususnya jalan yang ada di Kabupaten Lamongan, infrastruktur jalan yang baik dapat menunjang akses masyarakat pada sektor ekonomi, kesehatan, wisata, dan pendidikan. Dengan adanya program Jamula diharapkan dapat memperbaiki dan memperkecil jalan rusak yang ada di Kabupaten Lamongan, sebelum adanya program Jamula penanganan jalan belum sepenuhnya dapat tertangani dengan baik.⁴

Kebijakan Jamula ini dijalankan melalui peran Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Lamongan. Dinas ini memiliki tanggung jawab utama dalam merancang, merencanakan, serta melaksanakan pembangunan dan perbaikan jalan raya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Program Jamula dimulai pada tahun 2021 dan diperkirakan akan berlangsung hingga tahun 2026. Rencana jangka panjang ini mencerminkan keseriusan pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan infrastruktur jalan sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah.⁵ Jika dilihat dalam perspektif *siyash dusturiyah*, kebijakan pembangunan infrastruktur seperti Jamula dapat dijelaskan melalui prinsip-prinsip pembangunan islam. Menurut teori ini, pembangunan infrastruktur dianggap sebagai pendorong utama bagi pembangunan ekonomi,

³ *Ibid.*, 79.

⁴ *Ibid.*, 79.

⁵ Ahmad Sayuti Royali, Dkk "Apakah program "Jamula" berdampak terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan ? ditinjau dari Teori *Merilee Grindle*" , (2024), 318

karena infrastruktur yang baik memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dengan memperlancar distribusi barang dan jasa, menurunkan biaya transportasi, serta membuka akses ke pasar-pasar baru. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Lamongan memahami bahwa perbaikan jalan raya yang rusak tidak hanya akan mengatasi masalah transportasi, tetapi juga dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi, memperlancar distribusi barang, serta mendorong daya tarik investasi.⁶

Namun pada realita di lapangan, menurut penulis masih banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan khususnya di Kecamatan Solokuro, bahkan problematika jalan di wilayah Kabupaten Lamongan dijadikan *Black Campaign* (Kampanye hitam) untuk menyudutkan calon tertentu hal ini menimbulkan pertanyaan besar pada benak penulis, apakah memang program ini sudah dijalankan namun masyarakat tidak terdampak, atau paradigma masyarakat yang belum mengetahui tentang kebijakan infrastruktur jalan mana yang boleh dikelola oleh kabupaten dan mana yang tidak. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas maka terdapat identifikasi masalah yang dapat diajukan sebagai berikut: Bagaimana implementasi program jalan mantap dan alus Lamongan di Kecamatan Solokuro dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan. Dengan tujuan mengetahui implementasi program jalan mantap dan alus di Kecamatan Solokuro dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan didaerah tersebut dan untuk mengetahui tinjauan *siyasah dusturiyah* dalam implementasi program jalan mantap dan alus Lamongan di Kecamatan Solokuro.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami tentang “Implementasi Program Jalan Mantap dan Alus Lamongan terhadap pembangunan Kabupaten Lamongan ditinjau dari Siyasah Dusturiyah (Studi kasus program jamula di Kecamatan Solokuro)”.⁷

Metode penelitian kualitatif, yang mana penelitian sebagai suatu proses bertahap bersiklus yang dimulai dengan identifikasi masalah atau isu yang akan diteliti. Setelah masalah itu teridentifikasi kemudian diikuti dengan meriview bahan bacaan. Sesudah itu menentukan

⁶ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam simpul siyasah dusturiyah (Refleksi atas teori dan praktek Hukum Tata Negara di Indonesia)* (Bantul: Semesta Aksara, 2019), 13.

⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 5.

dan memperjelas tujuan penelitian, dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisa data. Kemudian menafsirkan data yang diperoleh sehingga terjadilah pelaporan.⁸ Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi atau penjabaran suatu gejala dalam masyarakat dengan menggunakan observasi, wawancara dan Dokumentasi.⁹

Sumber data ialah sumber data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung didapat dari Kecamatan Solokuro. Berupa hasil wawancara dengan narasumber atau informan yaitu orang yang berpengaruh dalam proses perolehan data atau bisa disebut *key member* yang memegang kunci sumber data penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain: Camat, Kepala Desa, dan masyarakat di Kecamatan Solokuro yang dianggap berpotensi memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan, dan data sekunder merupakan sumber data pendukung data primer yang diperoleh dari literatur dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti buku-buku, artikel dan sejenisnya.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.¹⁰

Pengertian implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, maupun kelompok-kelompok pemerintah atau swasta

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

⁹ Rofiq zaenal, *metodologi Penelitian* (Jakarta: Pustaka Press, 2011), 43.

¹⁰ Hongko Maolana, "Pengaruh Disposisi Pelaksana Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Baledu Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung" (Skripsi., Universitas Tidar, 2023), 7.

yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹¹ Grindle memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administrasi yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.¹² Selain model implementasi kebijakan grindle di atas. Van Meter dan Van Horn mengembangkan Model Proses Implementasi Kebijakan. Keduanya meneguhkan pendirian bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan dalam bertindak merupakan konsep penting dalam prosedur implementasi. Keduanya mengembangkan tipologi kebijakan menurut: (i) jumlah perubahan yang akan dihasilkan, dan (ii) jangkauan atau ruang lingkup kesepakatan mengenai tujuan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses implementasi.¹³

Implementasi kebijakan program jalan mantap dan alus Lamongan (Jamula) terhadap pembangunan di Kabupaten Lamongan yang diimplementasikan di salah satu kecamatan yang ada di Lamongan yakni kecamatan Solokuro. Kita tahu bahwa dibutuhkan kerjasama yang rapi dalam mengimplementasikan kebijakan program jalan mantap dan alus Lamongan (Jamula) dari tahap proses pembangunan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Jadi peneliti mencoba untuk mengambil salah satu model implementasi tersebut yaitu milik Van Meter dan Van Horn dengan menguji proses implementasi kebijakan jamula menggunakan dasar beberapa poin berikut:

a. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan.

Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

¹¹ Alamindah, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Barat Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Wilayah Kepanjen (Studi di Kabupaten Malang)" (Skripsi., Universitas Brawijaya Malang, 2018), 19.

¹² Delly Maulana, Dkk, *Kebijakan Publik Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik* (Serang: CV AA. Rizky, 2019), 100.

¹³ *Ibid.*, 104.

b. Sumber-sumber kebijakan.

Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

c. Ciri-ciri karakteristik badan atau instansi pelaksana.

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan

d. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketetapan komunikasi antar para pelaksana

e. Sikap para pelaksana.

Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan.

f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.¹⁴

2. Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pengertian Infrastruktur, menurut Grigg (1988) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain.¹⁵ Infrastruktur merupakan fondasi penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial sebuah negara atau wilayah. Infrastruktur mencakup berbagai elemen fisik yang memungkinkan terjadinya aktivitas manusia yang beragam, seperti transportasi, energi, komunikasi, serta penyediaan air bersih dan sanitasi. Dalam pengertian yang lebih luas, infrastruktur tidak hanya melibatkan komponen fisik, tetapi juga sistem dan

¹⁴ Moch Fitra Repas Alamindah, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Barat Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Wilayah Kapanjen (Studi di Kabupaten Malang)" (Skripsi., Universitas Brawijaya Malang, 2018), 23-24

¹⁵ Adip Sapuan, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang" (Skripsi., Universitas Tidar, 2023), 25

kebijakan yang mendukung operasionalitas dan keberlanjutan infrastruktur itu sendiri.¹⁶

Menurut UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk pembangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas, yang berada di permukaan tanah dan atau air serta di atas Permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.¹⁷ Jalan juga dapat diklasifikasikan menurut jalan alam (natural) dan jalan buatan (artifikal). Jalan alam ini merupakan pemberian alam dan arena tersedia untuk semua orang tanpa biaya. Sedangkan jalan buatan adalah jalan yang dibangun melalui usaha manusia secara sadar dengan sejumlah investasi dan tertentu untuk membuat konstruksinya dan pemeliharaannya.¹⁸

Dilihat dari kewenangannya, infrastruktur jalan dibedakan mejadi tiga kategori, yaitu:

a. Jalan Nasional

Merupakan jalan arteri atau jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer. Jalan ini menghubungkan antar ibukota provinsi, jalan strategis nasional, serta jalan tol. Tanggung jawab pembinaan jalan nasional berada pada pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum). Jalan nasional ini melayani kepentingan nasional atas dasar strategis, yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah-daerah rawan, bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani kepentingan perbatasan antar negara, serta dalam rangka pertahanan dan keamanan.

b. Jalan Provinsi

Merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.

c. Jalan Kabupaten atau Kota

¹⁶ Heni Fitriani, *Buku Referensi Manajemen Infrastruktur Strategi Dan Pemeliharaan*. (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2025), 15.

¹⁷ AsniAmalia, "Pengaruh pembangunan infrastruktur jalan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng" (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar, 2023), 11.

¹⁸ Evy Sriwati, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa" (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar, 2023), 25.

Merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten/kota dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten/kota dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten/kota, dan jalan strategis kabupaten/kota. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, bawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan rel.¹⁹

3. Pembangunan Daerah

Secara fundamental pembangunan bersal dari ilmu biologi yang menumpuhkan pada analisis lahir, tumbuh, dan berkembang kemudian mati. Menurut arief Budiman pembangunan ialah usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Setiap definisi menggambarkan pandangan, dan perspektif yang berbeda tergantung tujuan yang diinginkan. Mansour faqih menjelaskan bahwa pembangunan banyak dipahami sebagai kata benda yang netral yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat, dan sebagainya.²⁰ Menurut Siagian pembangunan merupakan “usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang merencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. “Dengan demikian, ide pokok pembangunan menurut Siagian mengandung makna: “(a) bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang tanpa akhir, (b) pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan secara terus menerus, (c) pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan, (d) pembangunan mengarah kepada modernitas, (e) modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multidimensional, proses, dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.”²¹

¹⁹ *Ibid.*25.

²⁰ *Ibid.*26.

²¹ Warjio, *Politik Pembangunan Paradoks, teori, actor, dan ideologi*. (Jakarta: Kencana, 2016), 97-98.

Pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan seperti yang dikemukakan oleh Bryant dan white, mengandung 3 aspek:

- a. Pembangunan harus memberikan penekanan pada kapasitas (*capacity*), kepada apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan tersebut serta energi yang diperlukan untuk itu.
- b. Pembangunan harus menekankan pada pemerataan (*equity*), perhatian yang tidak merata pada berbagai kelompok masyarakat akan memecah-belah masyarakat dan akan menghancurkan kapasitas mereka.
- c. Pembangunan menekankan pada pertumbuhan. Karena konsep kelangsungan dan kelestarian ini, untuk memajukan dan membangun pertumbuhan ekonomi lebih baik.²²

Teuku Nazaruddin menegaskan bahwa keberhasilan tujuan pembangunan nasional akan tercapai secara optimal sesuai dengan yang telah dicita-citakan, apabila terdapat perencanaan pembangunan yang cukup baik dalam berbagai aspek kehidupan. Pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pembangunan daerah, yang pada hakikatnya menjadi tempat terakumulasinya program-program pembangunan. Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan koordinasi perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya.²³

Penggunaan indikator dan variable pembangunan bisa berbeda di setiap Negara. Di negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di negara negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indicator pembangunan akan bergeser kepada faktor-faktor sekunder dan tersier.²⁴

²² Evy Sriwati, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa" (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar, 2023), 21

²³ Iskandar Kato, Dkk, *Manajemen Pembangunan Daerah*. (Makassar: Yayasan Kita Menulis, 2021), 12.

²⁴ Moch Fitra Repas Alamindah, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Barat Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Wilayah Kapanjen (Studi di Kabupaten Malang)" (Skripsi., Universitas Brawijaya Malang, 2018), 32.

4. Siyasah Dusturiyah

Siyasah berasal dari kata sasa, yang artinya mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan. Secara bahasa artinya bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politis.²⁵ Kata "dusturi" berasal dari bahasa arab Persia. Semula, artinya "seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama". Dalam perkembangan selanjutnya, kata dusturi digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroazter (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).²⁶

Siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan, disamping itu, perjalanan ijtihad para ulama mengingat terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan Salah satu kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah kontitusi Madinah atau Piagam Madinah.²⁷

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian daripada fikih siyasah yang membahas secara khusus terkait perundang-undangan negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura). Siyasah dusturiyah juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan symbiotic antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Selanjutnya, sumber dari siyasah dusturiyah menurut H. A. Djazuli meliputi:

- a. Al-Qur'an, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran al-Qur'an.
- b. Hadits, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw dalam menerapkan hukum.

²⁵ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam simpul siyasah dusturiyah (Refleksi atas teori dan praktek Hukum Tata Negara di Indonesia)* (Bantul: Semesta Aksara, 2019), 11-12.

²⁶ Beta Utami, "Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah" (Skripsi., Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 47

²⁷ *Ibid.*48.

- c. Kebijakan Khulafa al-Rasyidin, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing Khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan. Yaitu, kebijakan yang ber-orientasi pada kemaslahatan rakyat.
- d. Ijtihad 'Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam fikih dusturi bahwa hasil Ijtimak 'ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fikih dusturi.
- e. Adat Kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits.²⁸

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil dalil kulli, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulli tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada:

- a. Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk dalam persolan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam satu negara, seperti Undang- Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain
- c. Bidang siyasah qadlailiyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
- d. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.²⁹

²⁸ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam simpul siyasah dusturiyah (Refleksi atas teori dan praktek Hukum Tata Negara di Indonesia)* (Bantul: Semesta Aksara, 2019), 14-15

²⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah'*, Jakarta, Kencana, 2004, 47-48

5. Implementasi Program Jalan Mantap dan Alus di Kecamatan Solokuro dalam Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan

Implementasi kebijakan adalah langkah strategis untuk mewujudkan ketentuan atau program kedalam bentuk nyata, kebijakan tanpa implementasi tidak akan mempunyai makna sama sekali, bagaimanapun baiknya kebijakan itu dibuat tetapi tidak dibarengi dengan implementasi yang baik maka kebijakan itu hanya sebagai susunan kalimat yang tak enak dibaca. Efektif atau tidak efektifnya suatu program secara umum juga tergantung pada kebermanfaatan dan kepuasan masyarakat yang menikmati. Program jalan mantap dan alus Lamongan yang digagas oleh Bupati Kabupaten Lamongan, Bapak Yuhronur Efendi merupakan program solutif untuk mengatasi banyaknya jalan rusak di wilayah Lamongan, namun perlu diakui bahwa Program yang dicanangkan sejak tahun 2021 ini belum 100 % terealisasi.

Implementasi program Jamula di Kecamatan Solokuro masih belum optimal, dengan capaian diperkirakan belum mencapai 50%. Hal ini disebabkan oleh kondisi infrastruktur jalan yang masih banyak mengalami kerusakan, sementara alokasi anggaran dari pemerintah daerah terbatas dan harus dibagi dengan kecamatan lain yang memiliki kerusakan jalan lebih parah. Program prioritas Jamula yang digarap oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga ini sudah direalisasikan secara bertahap dan merupakan program yang amat penting. Program Jamula dinilai sebagai program strategis oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga karena bertujuan mewujudkan jalan mantap dan halus di Kabupaten Lamongan. Program ini dianggap penting untuk mendukung kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu terus disosialisasikan dan dipercepat pelaksanaannya. Namun tidak selamanya semua program dapat terealisasi dengan cepat namun disertai dengan perencanaan dan anggaran yang memadai, yang hal ini lah yang menjadi keawaman masyarakat terhadap

suatu program.

Realisasi program JAMULA di Kabupaten Lamongan mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain transisi kepemimpinan nasional serta penurunan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pasca-pandemi COVID-19. Sebelumnya, Lamongan rutin menerima DAK sebesar 30 hingga 80 miliar untuk pembangunan infrastruktur, namun pada masa transisi dan kebijakan efisiensi anggaran, DAK tidak lagi diterima. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Lamongan tetap menetapkan Jamula sebagai program prioritas yang harus dijalankan.

Selain faktor anggaran, faktor komunikasi terhadap masyarakat pun kami nilai kurang, yakni peneliti menemukan ketika melakukan observasi dan wawancara terhadap masyarakat, komentarnya pun beragam ada yang tidak pernah mendapatkan sosialisasi seputar program, ada yang masih kurang puas dengan program tersebut. Program Jamula dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jalan yang mulus mempercepat mobilitas masyarakat serta memperlancar aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah Kecamatan Solokuro

Sesuai dengan arahan Bupati Kabupaten Lamongan, bahwa anggaran Desa, ADD (Alokasi Dana Desa), dan lain sebagainya lebih diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur jalan, khususnya jalan poros desa guna menunjang program prioritas bupati yakni Jamula. Pemerintah Desa Solokuro telah menindaklanjuti arahan program Jamula dengan melakukan perbaikan pada jalan poros strategis kabupaten, khususnya pada ruas Solokuro–Kranji. Perbaikan dilakukan dalam bentuk pemasangan paving block di

wilayah yang menjadi kewenangan desa, yakni di wilayah Solokuro, mengingat status awal jalan tersebut merupakan jalan desa.

Dari hasil peneltian terdapat dua faktor yakni faktor pendukung dan faktor penghambat:

a. Faktor Pendukung

1. Sosial Kontrol

Kemajuan dalam berdemokrasi telah mengakibatkan berkembangnya kesadaran terhadap hak-hak masyarakat. Masyarakat akan semakin aktif berpartisipasi dalam mengambil inisiatif dalam urusan-urusan publik. Kebebasan pers dan media telah jauh berkembang yang antara lain ditandai dengan adanya peran aktif pers dan media dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Pembangunan yang dilaksanakan serta upaya pemeliharaan atas hasil-hasilnya menuntut adanya peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam prakteknya hal ini dikemas menjadi berbagai peraturan yang wajib dipahami agar dalam penerapannya tidak terjadi penyimpangan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM Aparatur baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Propinsi dan Pusat selalu menyelenggarakan berbagai pelatihan/kursus dalam rangka meningkatkan keterampilan Aparatur.

3. Penegakan Hukum

Peningkatan perwujudan masyarakat yang sadar hukum akan lebih memberikan akses terhadap informasi yang dibutuhkan dan akses terhadap

pelibatan dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan. Penuntasan penanggulangan, penyalahgunaan wewenang dicapai dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat akan mendorong peningkatan etika, budaya kerja, pengetahuan dan pemahaman pada tata kelola pemerintahan yang baik.³⁰

b. Faktor Penghambat

1. Terbatasnya Dana APBD

Walaupun secara bertahap besaran dana APBD yang dapat dialokasikan untuk membiayai belanja langsung pengadaan barang kebutuhan publik telah dapat dinaikan dari tahun ke tahun akan tetapi jumlah tersebut dirasakan masih belum mencukupi. Langkah langkah efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, penajaman prioritas, upaya mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam berpartisipasi mutlak diperlukan.

2. Faktor Alam yang ada di Kabupaten Lamongan,

Utamanya faktor Topografi, Kondisi Existing Jalan, dan rendahnya nilai daya dukung tanah.

3. Faktor Teknis

Terlampaunya umur rencana jalan, Peningkatan volume dan tonase kendaraan dan minimnya system drainase jalan.³¹

³⁰ Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026, 44

³¹ *Ibid*, 44-49.

6. **Tunjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Impelementasi Program Jamula di Kecamatan Solokuro**

Dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sesuai dengan prinsip islam yang ada pada siyasah dusturiyyah yakni adanya Prinsip Tanggung-Jawab yang dijelaskan dalam hadist “Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya, seorang kepala Negara yang memimpin rakyat bertanggung-jawab atas mereka, dan seorang laki-laki adalah pemimpin penghuni rumahnya dan bertanggung- jawab atas mereka”. (Muttafaq ‘alah). Dan prinsip hubungan antara pemimpin dan rakyat “Pemimpin-pemimpin kamu yang baik adalah pemimpin-pemimpin yang mencintai mereka (rakyat) dan mereka mencintai kamu, mereka mendoakan kamu dan kamu mendoakan mereka. Sedangkan pemimpin pemimpin kamu yang tidak baik adalah para pemimpin yang kamu benci dan mereka membenci kamu, kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu”. (H.R Ahmad).

Dari sini dapat kita jelaskan bahwa komunikasi antara rakyat dan pemimpin itu harus ada, sebab faktor musyawarah juga merupakan asas dalam siyasah dusturiyah, sesuai dengan ayat didalam Al Qur’an:

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”³²

Program jamula secara prosedural pembentukan program dan kebijakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip islam.

³² Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam simpul siyasah dusturiyah (Refleksi atas teori dan praktek Hukum Tata Negara di Indonesia)* (Bantul: Semesta Aksara, 2019), 49.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan deskripsi dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya mengenai implementasi program jalan mantap dan alus Lamongan terhadap pembangunan Kabupaten Lamongan ditinjau dari siyasah dusturiyah dengan studi kasus program jamula di Kecamatan Solokuro. Disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan berupaya memperbaiki seluruh jalan yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten Lamongan dengan program tersebut, dan hasil dari implementasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Implementasi program jamula adalah sebuah solusi dalam percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Lamongan dan implementasi program tersebut dalam kategori baik namun belum berhasil sebab program tersebut sudah dilaksanakan dan belum tercapai sesuai target, dimana juga terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor penghambat diantaranya ialah kurangnya disposisi masyarakat terhadap program tersebut dan kurangnya kekuatan keuangan daerah dalam menunjang program super prioritas tersebut.
2. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas tentang perundang-undangan. Implementasi Program Jamula di Kabupaten Lamongan khususnya di Kecamatan Solokuro menurut *Siyasah Dusturiyah* ada Siyasah Tasyri'iyyah (perencanaan), Siyasah Tanfidziyyah (pelaksanaan) dan konsep hisbah (pengawasan). Dalam Implementasi Program Jamula di Kabupaten Lamongan khususnya di Kecamatan Solokuro persepektif *Siyasah Dusturiyah* sudah sesuai. Mulai dari perencanaan, pembangunan infrastruktur, pelaksanaan pembangunan infrastruktur sampai pada pengawasan pembangunan infrastruktur sudah sesuai dengan konsep *Siyasah Dusturiyah*. Dan secara prinsip kepemimpinan dalam Islam, Bupati Lamongan sebagai khalifah sudah menjalankan daripada prinsip kepemimpinan dalam Islam diantaranya asas musyawarah, prinsip hubungan antar pemimpin dan bertanggung jawab, namun masih dalam kategori baik dalam catatan.

DAFTAR PUSTAKA

Admin, *Faktor-faktor Penghambat pada Proses Pembangunan*, <https://manajemen.uma.ac.id/2021/10/faktor-faktor-penghambat-pada-proses-pembangunan/> (Online), diakses pada 1 Januari 2025).

Akhbar Abaib M R L, Ali. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. Bantul: Semesta Aksara, 2019.

- Amalia, Asni. "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Desa Pesse Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng." Skripsi., Universitas Muhammadiyah Makassar, 2023.
- Andriyani, Nindy. "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur (Perbaikan Jalan) Jalan Raya Pasar Pringsewu Terhadap Ekonomi Masyarakat Sekitar Dalam Ekonomi Islam." Skripsi., Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018.
- Andriyani S, Zupi. "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Sumber Daya Alam Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten. Labuhanbatu Utara." Skripsi., Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi V*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2012.
- Djazuli, A, *Fiqh Siyasah Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah'*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Fitra Repas A, Mochammad. "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Barat Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Wilayah Kepanjen (Studi Di Kabupaten Malang)." Skripsi., Universitas Brawijaya Malang, 2018.
- Fitri R, Muhammad, Dkk. *Pelayanan Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Hamid, Hendrawati. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Makassar: Garis Khatulistiwa, 2020.
- Hasanah L, Nurul. "Analisis Kesejahteraan Masyarakat Dalam Persepektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Lingkungan Xvi, Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung)." *Jurnal Masharif al-syariah*, Vol 08, No.2 (2023), 811.
- Ihdal Umam, Farih. "Pembangunan Infrastuktur di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Perspektif Siyasah Dusturiyyah." Skripsi., Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Kato, Iskandar, Dkk, *Manajemen Pembangunan Daerah*. Makassar: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Kursiyah, Sri, Prinsip-Prinsip Islam Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara, *Jurnal Hukum Khaira Umma*, Volume 1, No 1, 2006.
- Maolana, Hongko "Pengaruh Disposisi Pelaksana Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Baledu Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung" Skripsi., Universitas Tidar, 2023.

Maulana, Delly. *Kebijakan Publik (cara mudah memahami kebijakan publik)*. Banten: CV AA Rizky, 2019.

Maulidah, Sri. *Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan*. Bandung: CV Indra Prahasta, 2014.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Munier, Abdul. *Kelas dan Manajemen*. Bandung: Rosdakarya, 2009.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 10 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021 - 2026.

Pemkab Lamongan, Kecamatan Solokuro – Tentang kami, [https://lamongankab.go.id/beranda/solokuro/profil/tentang-kami#:~:text=Kecamatan%20Solokuro%20merupakan%20dataran%20tinggi,seluas%2087%2C57%20KM2,\(Online\),diakses pada 22 Januari 2025](https://lamongankab.go.id/beranda/solokuro/profil/tentang-kami#:~:text=Kecamatan%20Solokuro%20merupakan%20dataran%20tinggi,seluas%2087%2C57%20KM2,(Online),diakses+pada+22+Januari+2025)

Reviu Rencana Strategis Renstra tahun 2021-2026, Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan.

Ridwan, Tujuan pembangunan wilayah, [https://www.kompasiana.com/ridwansemn4284/64d3b4b0633ebc41dd6fdbf2/tujuan-pembangunan-wilayah?page=2&page_images=1,\(Online\),diakses pada 1 Januari 2025](https://www.kompasiana.com/ridwansemn4284/64d3b4b0633ebc41dd6fdbf2/tujuan-pembangunan-wilayah?page=2&page_images=1,(Online),diakses+pada+1+Januari+2025)).

Romarina, Arina. *Perencanaan pembangunan daerah (teori & praktek)*. Sleman: Deepublish, 2024.

Safriadi, Tgk. *Maqāshid Al-Syari'ah & Mashlahah Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al Buthi*. Lhoksumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.

Sapuan, Adip. "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang." Skripsi., Universitas Tidar Magelang, 2023.

Sau'ud A, Saudi. "Implementasi program jalan mantap dan alus lamongan (Jamula)." *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol 14, No.1 (2023), 80.

Sayuti R, Ahmad. "Apakah Program "Jamula" Berdampak Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Lamongan? Ditinjau Dari Teori Merilee Grindle." *Scientific journal of economics, management, business, and accounting*. Vol 14, No 2 (2024), 318.

Sriwati, Evi. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa." Skripsi., Universitas Muhammadiyah Makassar, 2023.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.

Tabroni, Gamal, *Program: Pengertian, Tujuan, Strategi, Perencanaan & Penyusunan*, <https://serupa.id/program-pengertian-tujuan-strategi-perencanaan-penyusunan/> (Online), diakses pada tanggal 28 Desember 2024).

Thosin H A, Sibnu. "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Lamongan." *Artikel*.

Utami, Beta. "Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah." Skripsi., Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Warjio. *Politik pembangunan (paradoks, teori, actor, dan ideologi)*. Jakarta: Kencana, 2016.

Zakky, *Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, KBBi dan Secara Umum*, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/> (Online), diakses pada 1 Januari 2025).